

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan pengembangan perekonomian nasional maupun daerah sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan pembangunan dan sosial kemasyarakatan seperti pertumbuhan ekonomi yang rendah, pendidikan rendah, dan kemiskinan. Kinerja pembangunan dapat dilihat dari beberapa aspek seperti produktifitas dan seberapa efektifnya pemanfaatan sumber daya yang tersedia sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.

Berdasarkan Publikasi BAPPENAS 2017 diproyeksikan Indonesia akan mengalami bonus demografi pada tahun 2030 sampai dengan tahun 2040. Sedangkan khususnya di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019 sudah mengalami bonus demografi. Kondisi ini terlihat dari angka ketergantungan penduduk Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019 sudah berada di bawah 50% yaitu sebesar 49,59%. Artinya pada tahun 2019 komposisi penduduk usia produktif di Provinsi Kalimantan Barat lebih banyak dari pada komposisi penduduk usia tidak produktif. Dengan kata lain dari 5.069.127 jiwa penduduk Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019, sebanyak 2.555.347 jiwa atau 50,41% dari total jumlah penduduk merupakan penduduk usia produktif atau penduduk dengan rentan usia 15 sampai dengan 64 tahun. Sedangkan 2.513.780 jiwa penduduk lainnya atau sebanyak 49,49% dari total jumlah penduduk merupakan penduduk usia tidak produktif. Keadaan ini dapat diartikan bahwa setiap satu orang penduduk usia produktif menanggung satu orang penduduk usia tidak produktif.

Keadaan ini merupakan kesempatan bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat untuk meningkatkan kualitas sosial ekonomi ke tingkatan yang lebih baik. Dikarenakan dengan komposisi penduduk yang didominasi oleh penduduk usia produktif akan meningkatkan produksi daerah sehingga dapat meningkatkan perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

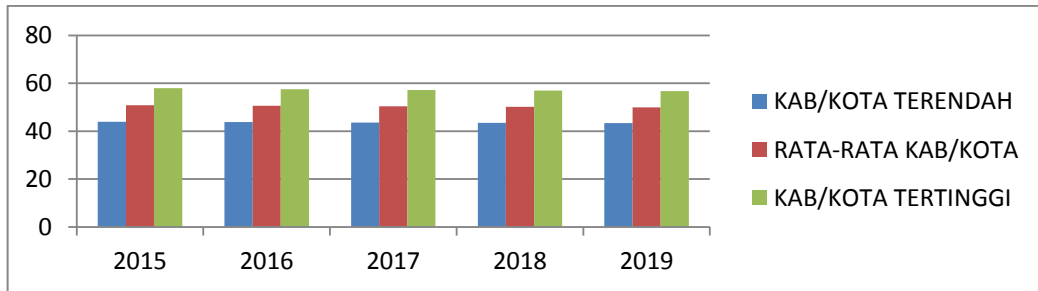
Akan tetapi jika kondisi ini tidak dimanfaatkan serta diantisipasi melalui kebijakan program dan kegiatan yang tepat, maka akan menyebabkan angka pengangguran akan terus meningkat. Peningkatan angka pengangguran ini tentunya akan menyebabkan bermuncunya masalah lainnya seperti, angka kemiskinan meningkat, angka kriminalitas meningkat, serta bonus demografi justru malah menjadi pintu masuk bagi masalah-masalah pembangunan ekonomi dan sosial lainnya.

Tabel 1. 1
Angka Ketergantungan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2015-2019 (persen)

Kab/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Sambas	57.91	57.55	57.22	56.95	56.77
Bengkayang	55.14	54.83	54.53	54.28	55.42
Landak	52.23	51.97	51.73	51.54	56.20
Mempawah	54.03	53.75	53.48	53.28	52.12
Sanggau	47.49	47.23	46.98	46.78	46.49
Ketapang	49.75	49.49	49.25	49.05	45.78
Sintang	51.52	51.24	50.98	50.76	50.43
Kapuas Hulu	49.13	48.85	48.58	48.36	47.53
Sekadau	50.14	49.88	49.64	49.46	48.88
Melawi	48.28	48.01	47.76	47.55	47.33
Kayong Utara	54.49	54.19	53.90	53.67	54.22
Kubu Raya	51.76	51.51	51.27	51.09	50.94
Kota Pontianak	43.95	43.77	43.60	43.49	43.41
Kota Singkawang	54.31	54.08	53.87	53.71	53.61
Kalimantan Barat	50.87	50.60	50.35	50.14	49.95

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020

Grafik 1. 1
Angka Ketergantungan Laki-laki dan Perempuan Kabupaten/Kota
Di Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2015-2019 (persen)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020

Berdasarkan Table 1.1 dan Grafik 1.1, angka ketergantungan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat sepanjang tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami penurunan. Dimana awalnya pada tahun 2015 sebesar 50,87% menjadi 49,95 pada tahun 2019. Kota Pontianak merupakan Kabupaten/Kota yang memiliki angka ketergantungan yang paling kecil dimana pada tahun 2015 sudah mencapai angka 43,95%. Selain Kota Pontianak, Kabupaten Sanggau, Ketapang, Kapuas Hulu dan Melawi juga sudah mengalami bonus demografi sejak tahun 2015. Dimana angka ketergantungannya sudah dibawah 50%. Sementara itu Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang merupakan Kabupaten/Kota yang memiliki angka ketergantungan terbesar dimana sepanjang tahun 2015-2019 rata-rata angka ketergantungan Kabupaten Sambas adalah sebesar 57,28% dan Kabupaten Bengkayang 54,84%.

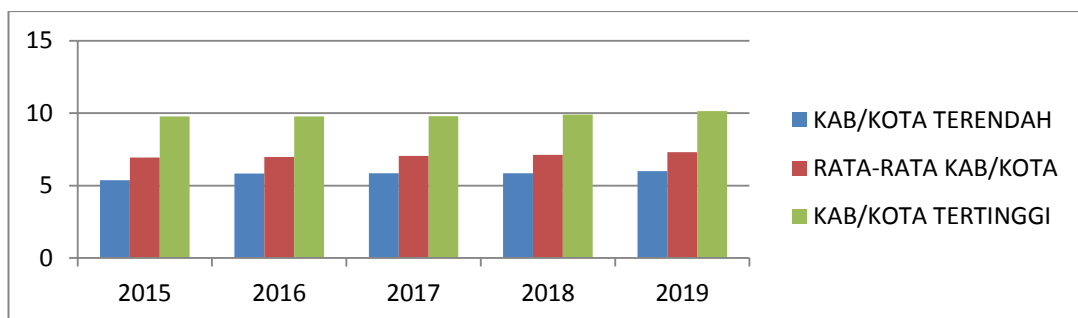
Selain kuantitas, kualitas sumber daya manusia juga merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan produksi dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dengan kualitas sumber daya yang baik akan menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam suatu kegiatan produksi. Dengan begitu titik optimum akan dapat dicapai. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat melalui tingkat pendidikan dari sumber daya tersebut. Sedangkan tinggi rendahnya tingkat pendidikan suatu masyarakat dapat diukur dan dilihat melalui rata-rata lama sekolah masyarakat suatu wilayah.

Tabel 1. 2
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2015-2019 (Tahun)

Kab/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Sambas	6.13	6.42	6.67	6.68	6.70
Bengkayang	5.98	6.08	6.09	6.27	6.53
Landak	7.06	7.07	7.08	7.09	7.10
Mempawah	6.45	6.46	6.47	6.63	6.82
Sanggau	6.74	6.92	6.93	6.94	6.95
Ketapang	6.56	6.68	7.03	7.04	7.26
Sintang	6.70	6.71	6.72	6.73	6.89
Kapuas Hulu	7.00	7.01	7.02	7.25	7.47
Sekadau	6.55	6.56	6.57	6.58	6.60
Melawi	6.42	6.52	6.53	6.66	6.67
Kayong Utara	5.37	5.84	5.85	5.86	6.00
Kubu Raya	6.56	6.57	6.58	6.81	6.82
Kota Pontianak	9.77	9.78	9.79	9.90	10.14
Kota Singkawang	7.28	7.29	7.30	7.57	7.72
Kalimantan Barat	6.93	6.98	7.05	7.12	7.31

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020

Grafik 1. 2
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2015-2019 (Tahun)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020

Berdasarkan table 1.2 dan grafik 1.2 maka dapat disimpulkan bahwa sepanjang tahun 2015-2019 rata-rata lama sekolah masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan selama 0,38 tahun dimana semulanya hanya selama 6,93 tahun pada tahun 2015 meningkat menjadi 7,31 tahun pada tahun 2019.

Sedangkan berdasarkan Kabupaten/Kota sepanjang tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 Kabupaten/Kota yang berpendidikan tertinggi adalah masyarakat Kota Pontianak yaitu dengan rata-rata lama sekolah pada tahun 2015 sebesar 9,77 tahun atau setara kelas 1 Sekolah Menengah Atas dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2019 mencapai 10,14 tahun atau setara kelas 1 Sekolah Menengah Atas. Sementara Kabupaten/Kota dengan rata-rata lama sekolah terendah di Provinsi Kalimantan Barat adalah Kabupaten Kayong Utara yaitu pada tahun 2015 hanya selama 5,37 tahun saja atau setara kelas 6 semester ganjil Sekolah Dasar.

Selain memperhatikan kualitas sumber daya manusia, wadah yang akan menampung atau memberdayakan sumberdaya manusia tersebut juga haruslah dipersiapkan. Dengan kata lain diperlukan lapangan kerja untuk penyerapan tenaga kerja tersebut agar tenaga kerja yang tersedia dapat produktif atau tidak menganggur. Disinilah peran investasi sangat diperlukan untuk menjadi modal untuk perluasan usaha maupun pembangunan yang dapat menyerap tenaga kerja.

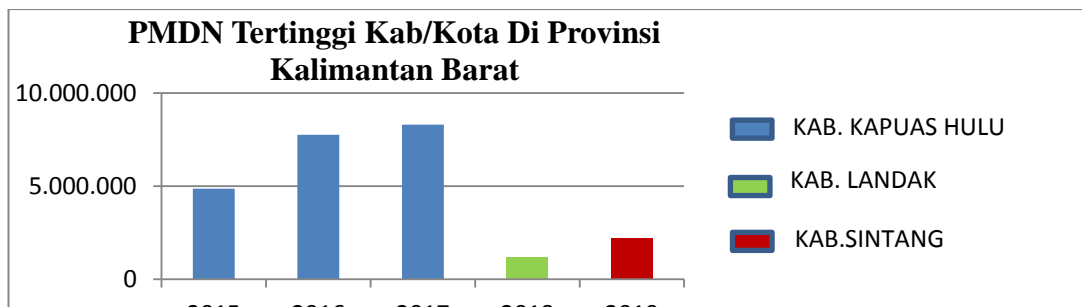
Keberadaan investasi diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran terbuka khususnya di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Dapat kita lihat jumlah investasi di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2015 sampai tahun 2017 terus mengalami peningkatan pada tahun 2018 sampai tahun 2019 mengalami penurunan yang sangat drastis ini dapat kita lihat pada tabel 1.3 dan grafik 1.3.

Tabel 1. 3
Penanaman Modal Dalam Negeri
Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)

Kab/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Sambas	783,947	928,783	1,154,041	355,494	400,474
Bengkayang	2,486,223	4,512,610	4,512,610	135,866	316,713
Landak	1,277,140	2,008,475	4,703,678	1,189,331	176,210
Mempawah	3,537,598	3,690,495	5,982,129	352,010	378,527
Sanggau	4,294,885	4,485,120	7,481,136	602,454	947,710
Ketapang	4,725,125	6,502,895	7,279,009	693,986	771,943
Sintang	4,420,406	5,273,439	6,432,156	688,510	2,191,190
Kapuas Hulu	4,853,202	7,753,023	8,294,432	469,318	464,387
Sekadau	1,122,680	1,392,147	1,732,644	798,986	556,383
Melawi	2,559	2,559	61,673	29,688	575,601
Kayong Utara	186,000	186,000	186,000	0	120,593
Kubu Raya	2,212,940	3,096,429	4,302,965	983,442	743,641
Kota Pontianak	450,506	455,631	512,766	278,661	51,294
Kota Singkawang	66,941	96,179	111,451	136,340	1,170
Kalimantan barat	30,420,152	40,383,786	52,746,691	6,591,384	7,695,834

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat (KALBAR Dalam Angka 2016-2020)

Grafik 1. 3
Penanaman Modal Dalam Negeri
Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat (KALBAR Dalam Angka 2016-2020)

Berdasarkan Tabel 1.3 dan Grafik 1.3 PMDN Provinsi Kalimantan Barat mengalami peningkatan jumlah yang sangat besar sepanjang tahun 2015 sampai tahun 2017 dimana jumlahnya pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 30.420.152.000.000; dan menjadi Rp. 52.746.691.000.000; pada tahun 2017 kemudian menurun pada tahun 2018 sampai tahun 2019 yang dimana jumlah investasi di tahun 2018 berjumlah Rp.6.591.384.000.000 dan pada tahun 2019 berjumlah Rp.7.695.834.000.000. Selain itu berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, setiap Kabupaten dan Kota juga sepanjang tahun 2015 sampai 2017 mengalami peningkatan jumlah investasi.

Kabupaten Kapuas Hulu merupakan Kabupaten/Kota dengan jumlah investasi paling besar dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Barat yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp.8.294.432.000.000; selanjutnya di ikuti oleh Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang dengan masing-masing investasi berturut-turut sebesar Rp. 7.481.136.000.000; dan Rp. 7,279,009.000.000;.

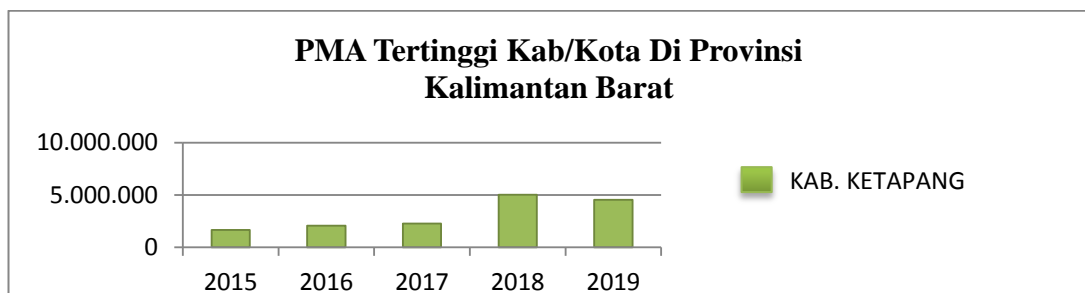
Berdasarkan Tabel 1.4 dan Grafik 1.4 penanaman modal asing Provinsi Kalimantan Barat mengalami peningkatan sepanjang tahun 2015 sampai tahun 2019 dimana jumlahnya pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 4.446.701.000.000; dan menjadi Rp.7.988.108.000.000; pada tahun 2019. Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang merupakan Kabupaten/Kota dengan jumlah penanaman modal asing terbesar pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp.4.552.811.000.000; diikuti oleh Kabupaten Bengkayang yang menempati urutan kedua dengan jumlah penanaman modal asing terbesar yaitu sebesar Rp.1.988.925.000.000;. Sementara itu Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Kayong Utara tidak memiliki penanaman modal asing pada tahun 2019 .

Tabel 1. 4
Penanaman Modal Asing
Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)

Kab/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Sambas	272,313	379,899	413,396	23,757	216,569
Bengkayang	11,708	131,346	186,219	290,487	1,988,925
Landak	326,550	429,952	501,650	224,837	81,623
Mempawah	190,648	197,205	204,074	323,866	53,252
Sanggau	1,024,192	1,145,294	1,244,033	184,003	822,612
Ketapang	1,652,878	2,063,059	2,270,624	5,029,780	4,552,811
Sintang	112,065	141,581	200,715	57,509	84,059
KapuasHulu	50,715	72,447	73,257	-	-
Sekadau	217,845	320,283	320,313	21,365	75
Melawi	128,797	148,580	166,787	3,749	3,612
KayongUtara	-	4	24	35	-
KubuRaya	331,445	469,559	472,076	44,178	51,222
KotaPontianak	127,543	130,225	144,113	388,411	133,343
KotaSingkawang	-	-	330	-	8
KalimantanBarat	4,446,701	5,629,435	6,197,611	6,591,977	7,988,108

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat (KALBAR Dalam Angka 2016-2020)

Grafik 1. 4
Penanaman Modal Asing
Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat (KALBAR Dalam Angka 2016-2020)

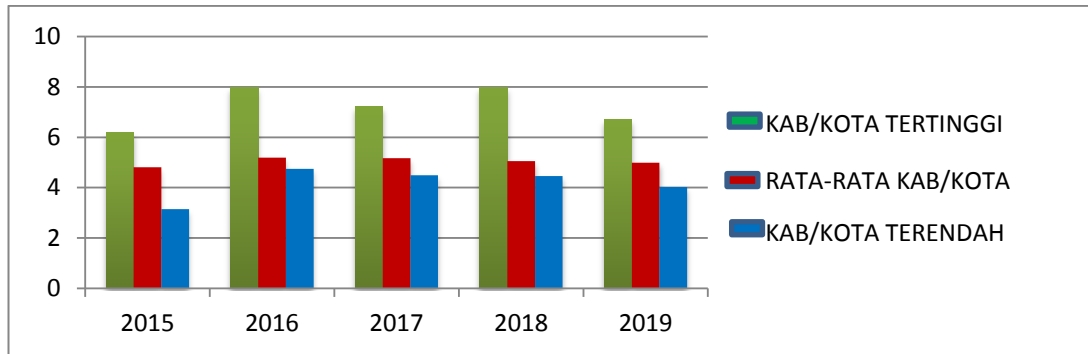
Akan tetapi seiring dengan menurunnya angka ketergantungan, peningkatan tingkat pendidikan, dan peningkatan investasi setiap tahunnya di Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan upaya peningkatan produksi ternyata tidak sepenuhnya berhasil. Dimana sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat memiliki tren yang menurun setiap tahunnya. Keadaan ini dapat dilihat pada table 1.4 dan grafik 1.4.

Tabel 1. 5
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
Di Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2015-2019 (Persen)

Kab/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Sambas	4.78	5.24	5.13	5.10	4.89
Bengkayang	3.96	5.15	5.66	5.37	5.23
Landak	5.11	5.28	5.21	5.12	5.01
Mempawah	5.60	5.99	5.93	5.87	5.81
Sanggau	3.15	5.34	4.50	4.47	4.30
Ketapang	5.53	7.97	7.21	7.99	6.72
Sintang	4.65	5.28	5.33	5.47	5.09
Kapuas Hulu	4.67	5.28	5.39	5.23	4.03
Sekadau	5.75	5.93	5.85	5.88	4.49
Melawi	4.61	4.75	4.79	5.44	4.97
Kayong Utara	5.03	5.98	5.42	5.02	5.04
Kubu Raya	6.21	6.37	6.56	5.49	5.82
Kota Pontianak	4.84	5.08	5.05	5.03	4.81
Kota Singkawang	6.18	5.17	5.42	4.71	4.53
Kalimantan Barat	4.81	5.20	5.17	5.06	5.00

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020

Grafik 1. 5
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
Di Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2015-2019 (Persen)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020

Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Kabupaten Ketapang pada tahun 2018 yaitu sebesar 7,99% sementara pertumbuhan ekonomi terendah terjadi di Kota Pontianak yang hanya sebesar 3,15% pada tahun 2015.

Selain itu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Kayong Utara merupakan Kabupaten/Kota dengan pertumbuhan ekonomi yang paling stabil dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya. Dimana pertumbuhan ekonominya sepanjang tahun 2015 sampai 2019 konsisten berturut-turut berada di angka 6% dan 5%.

Seiring dengan penurunan angka ketergantungan, serta peningkatan pada pendidikan dan investasi di Provinsi Kalimantan Barat sepanjang tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sebagai upaya untuk meningkatkan produksi ternyata tidak sepenuhnya berhasil. Hal ini ditunjukkan oleh keadaan sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat memiliki kecenderungan mengalami penurunan sepanjang tahunnya. Berdasarkan kondisi di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berupa pengujian dan analisis pengaruh angka ketergantungan, pendidikan dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Pernyataan Masalah

Dimana sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2019 angka ketergantungan di Provinsi Kalimantan Barat terus mengalami penurunan artinya setiap tahunnya proporsi penduduk usia produktif semakin dominan dibandingkan penduduk usia non produktif. Dominannya penduduk usia produktif, peningkatan tingkat pendidikan dan investasi ini diharapkan dapat meningkatkan kegiatan produksi yang optimal, efektif dan efisien di Provinsi Kalimantan Barat. Akan tetapi harapan ini tidak sejalan dengan keadaan yang terjadi dimana pertumbuhan ekonomi justru mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai dengan 2019.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

1. Apakah angka ketergantungan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat?
2. Apakah pendidikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat?
3. Apakah investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh angka ketergantungan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

1.4 Kontribusi Penelitian

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana pengaruh angka ketergantungan, pendidikan dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan referensi pada penelitian berikutnya yang berkaitan dengan variabel-variabel yang terdapat di penelitian ini.